



MEWUJUDKAN LULUSAN PRODI PAI BERKOMPETEN SESUAI KEBUTUHAN DUNIA KERJA

Opik Abdurrahman Taufik¹, Suprpto²

^{1,2} Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI

e-mail: taufikrachman74@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan kurikulum prodi agama berbasis KKNI dalam mewujudkan lulusan yang kompeten dengan dunia kerja. Melalui metode library research, dan hasil kajian FGD, penelitian ini menelaah dan menganalisis literatur peraturan perundangan berkenaan dengan kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam serta kajian pengembangan kurikulum pada beberapa PTKI di Indonesia. Penyetaraan lulusan prodi PAI dengan berbagai bidang dan sektor pekerjaan menjadi harapan utama dari pengembangan kurikulum ini. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ini menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum dan pemetaan mutu pendidikan. Terkait dengan hal tersebut kurikulum pendidikan agama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan lulusan yang kompeten. Berdasarkan kajian data dan hasil workshop dapat disimpulkan bahwa profil lulusan suatu prodi akan ditentukan oleh asosiasi prodi masing-masing. Alur pencapaiannya dimulai dari penentuan jumlah dan nama mata kuliah yang tepat sesuai kebutuhan profil lulusan, penyiapan fasilitas yang memadai dan dosen serta staf yang kompeten. Kerjasama yang baik dengan instansi dan mitra di luar kampus sangat penting untuk pelaksanaan praktik mengajar dan pemerolehan sertifikat atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Sinergi antara dosen dan kepemimpinan yang bagus akan melahirkan lulusan yang kompeten

Kata Kunci: KKNI, kurikulum, lulusan, prodi PAI

Abstract

This study aimed to analyze and describe the curriculum development of the KKNI-based religion study program in realising competent graduates in the workplace. Through the library research method, and the results of the FGD, this research examined and analyzed the literature on regulations regarding the curriculum in several Islamic Religious Colleges (PTKI) and studies on curriculum development at several PTKI in Indonesia. The equalization of Islamic Religious Education graduates in various fields and working sectors is the main expectation of this curriculum development. The Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) becomes a reference in curriculum development and the mapping of education quality assurance. Thus, the religious education curriculum at Islamic Religious Colleges (PTKI) needs to be further developed to create competent graduates. Based on the study of the data and the results of the workshop, it can be

concluded that the profile of graduates of a certain study program will be determined by its association. The path of achievement starts from determining the number and the appropriate course titles according to the needs of the graduate profiles, planning on adequate facilities and competent lecturers and staff. Good cooperation with institutions and partners outside the campus is very important for the implementation of teaching practices and the achievement of certificates/Diploma Supplement (SKPI). The synergy between lecturers and good leadership will produce competent graduates.

Keywords: KKNI, curriculum, graduates, Religious Study Program

PENDAHULUAN

Secara tegas Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (bab V Pasal 12 ayat 1 point a). Hal ini berarti bahwa setiap peserta didik di setiap jalur dan jenjang pendidikan, mulai tingkat dasar, menengah sampai tinggi, berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru agama yang seagama dengan peserta didik.

Pendidikan agama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan kelanjutan dari pendidikan agama Islam yang dilaksanakan pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Menurut PP No. 55 tahun 2007 pada pasal 1 ayat 1 dalam Ketentuan Umum dinyatakan bahwa “Pendidikan agama adalah sebuah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama merupakan mata kuliah tersendiri, tidak digabungkan dengan mata pelajaran/mata

kuliah lainnya pada semua jenjang pendidikan, termasuk pada bangku kuliah.

Adapun fungsi pendidikan agama yang disebutkan dalam PP di atas adalah “membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama”. Sedangkan tujuan Pendidikan agama dalam PP No 55 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah untuk mengembangkan kecakapan siswa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Tanggungjawab pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan agama pada semua jalur dan jenjang pendidikan adalah Menteri Agama (Pasal 3 ayat 2).

Penyiapan guru agama Islam tidak hanya dipersiapkan oleh PTKI (negeri dan swasta), tetapi juga ada pada prodi di perguruan tinggi binaan Kemenristekdikti seperti di UPI Bandung, UNP Padang, UNJ Jakarta dan lainnya (Munadi, 2020).

Kurikulum Prodi PAI di PTKI berdasar pada Keputusan Menteri Agama RI No. 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi serta mengacu kepada Peraturan pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 Tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan.

Hasil sebuah penelitian menyebutkan bahwa Kurikulum S2 PAI telah sesuai dengan tuntutan KKNI dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja. Untuk menuju pengembangan kurikulum berbasis KKNI maka seyogyanya ada sebuah konsep untuk memadukan atau mengintegrasikan antara ilmu agama dengan umum (Suprpto, 2018a).

Di dalam KKNI dijelaskan bagaimana ketercapaian pembelajaran dan penyetaraan kompetensi lulusan yang dapat diterima pada berbagai sektor pekerjaan, di samping menjelaskan penjenjangan karir. Dalam pedomannya dijelaskan bahwa kualifikasi KKNI dirumuskan pada sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, serta hak/wewenang dan tanggung jawab. Masing-masing tingkatan kualifikasi pada KKNI mempunyai kesepadanan dengan ketercapaian pembelajaran yang diperoleh dengan pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jabatan operator diperuntukkan untuk jenjang 1-3, jabatan teknisi atau analis untuk jenjang 4-6, dan jabatan ahli untuk jenjang 7-9 (Kemendikbud, 2019).

Model dalam KKNI ini menjadi rujukan dalam pembuatan kurikulum (termasuk prodi PAI) dan merupakan penjaminan mutu pendidikan Indonesia. Penyusunan kurikulum dengan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) akan meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.

Kebijakan pemerintah dalam peraturan di atas juga menunjukkan bahwa

pendidikan agama Islam di perguruan tinggi harus merupakan salah satu mata kuliah wajib umum yang harus berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan mata kuliah lainnya. Pendidikan agama Islam di PTKI adalah kelompok bahan kajian yang dirancang untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang berkarakter, jujur dan berintegritas, religius dan toleran, disiplin dan demokratis dalam semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam hal ini, agama dipelajari tidak hanya sebagai pengetahuan tapi juga harus mencerminkan perilaku secara individual maupun sosial.

Dalam pelaksanaannya, kompetensi yang ingin dicapai dalam pendidikan agama, sulit untuk terealisasi. Merujuk pada hasil temuan tim peneliti Puslitbang Penda Kemenag RI, menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya kompetensi tersebut, antara lain; (a) jumlah sks untuk mata kuliah agama yang sangat terbatas, meski ada yang menambah 2 sks sehingga menjadi 4 sks (b) domain pembelajaran yang dominan kognitif (c) terbatasnya metode pembelajaran yang cenderung ke arah dogmatif, tidak kritis, dan mempunyai sifat monolog doktriner, (c) materi pengajaran PAI yang kurang memadai, (d) dan dosen yang kurang kompeten (peneliti, 2003). Di sisi lain penyelenggaraan pendidikan agama Islam belum maksimal, yang disebabkan antara lain dari segi metodologi, pembelajaran PAI belum banyak mengintrodusir aspek rasionalitas ajaran agama. PAI terkesan pengulangan-pengulangan materi sebelumnya, sehingga materi PAI belum menjadi stimulus pemikiran rasional mahasiswa. Selain itu, kompetensi tenaga pengajar yang kurang memadai juga menjadi kendala, seperti: penggunaan metode pembelajaran PAI masih

menggunakan pembelajaran tradisional dan banyak dosen PAI yang kurang mampu mengelaborasi dan mendialogkan materi PAI dengan konteks sosial budaya.

Sebagai contoh ; perlu *review* kurikulum bahasa Inggris berdasarkan kebutuhan mahasiswa Jurusan PAI (Suprpto, 2018b), karena bisa jadi hal ini yang menyebabkan banyak mahasiswa belum puas dengan pembelajaran PAI di kampus, mereka memperdalam wawasan agamanya melalui organisasi keagamaan mahasiswa dan kajian-kajian keagamaan atas prakarsa mereka sendiri (Tim Peneliti Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2003). Perbedaan pendekatan pembelajaran PAI juga menjadi salah satu pemicu mahasiswa mencari model lain di luar kampus.

Model pengembangan kurikulum Prodi PAI sesuai kemampuan PTKI sehingga berkompeten dan sesuai dengan duni kerja merupakan hal yang dideskripsikan dalam hasil penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Sejatinya penelitian (pada umumnya) berfungsi menemukan alternatif dalam pemecahan masalah. Penelitian ini berjenis empiris, yaitu suatu kegiatan yang dapat diamati oleh indera manusia sehingga dapat diamati dan diketahui cara-cara yang digunakannya (Mahmud, 2011), dan digunakan pendekatan *library research* untuk memberikan penguatan pada objek data dari hasil kajian pustaka berupa buku dan naskah akademik lainnya (Hadi, 2002).

Penelitian ini menelaah dan menganalisis literatur peraturan perundangan berkenaan dengan kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam serta kajian pengembangan kurikulum pada beberapa PTKI di Indonesia. Data juga diperoleh dari hasil kegiatan Forum Group

Discussion pada workshop pengembangan prodi PAI berbasis KKNi di PTKI yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2019.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk menguraikan dan menginterpretasi data, opini yang sedang berkembang, proses yang sedang terjadi, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berlangsung (Sumanto, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dalam Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 adalah “kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan”. Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa KKNi merupakan salah satu barometer mutu pendidikan Indonesia, yang di dalamnya terdapat sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, untuk menghasilkan sumber daya manusia bermutu dan produktif.

Pengembangan KKNi sudah berjalan sangat lama yang dimulai dari usaha pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan.

Sebuah *Milestone* penting dalam proses penyusunan KKNi dimulai dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Kemendikbud, 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional sebagai dasar kerja besar pengembangan KKNI pada tahun-tahun selanjutnya, sampai pada tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Program pengembangan KKNI sebelum tahun 2015 lebih mengutamakan menyusun konsep dan mulai dicoba dengan bentuk kerangka operasional yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dengan Peraturan Presiden tersebut, KKNI telah menjadi rujukan dalam penyetaraan capaian pembelajaran pada berbagai sektor yang ada di Indonesia. Kemudian untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan KKNI di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 yang mengatur penerapan KKNI di perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan tinggi di Indonesia secara merata dan menyeluruh. Pengaplikasian KKNI di perguruan tinggi memberikan hasil berupa program-program yang membuat KKNI semakin berdaya dan berkembang (Kemendikbud, 2021).

Sebagai barometer mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan, pelatihan, serta sistem pengakuan kompetensi kerja secara nasional, KKNI dimaksudkan menjadi pedoman untuk:

1. menentukan kualifikasi capaian pembelajaran yang didapatkan dengan pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja;

2. menyusun kerangka pengakuan kecakapan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja;
3. membuat kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja menjadi setara
4. membuat metode dan prosedur pengakuan kompetensi tenaga kerja dari negara lain yang akan berkarya dan berprofesi di Indonesia (Kemendikbud, 2019).

Dalam jangka panjang, apabila dapat direalisasikan KKNI akan berdampak pada:

1. naiknya jumlah SDM Indonesia yang mempunyai mutu dan daya saing internasional sehingga bisa meningkatkan akses ke pasar kerja nasional dan internasional;
2. naiknya andil capaian pembelajaran yang didapatkan pada pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam tumbuh kembang ekonomi nasional;
3. naiknya ruang gerak akademik untuk menambah rasa saling pengertian, solidaritas, dan kerja sama pendidikan tinggi antar-negara di dunia;
4. naiknya pengakuan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun internasional terhadap Indonesia dengan tetap mempertahankan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia (Kemendikbud, 2019).

Terdapat sembilan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang ada pada KKNI. Deskripsi kualifikasi setiap jenjang pada KKNI secara komprehensif sudah mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan, baik formal,

non-formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap tingkatan kualifikasi juga diselaraskan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta dengan pertumbuhan lini-lini yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait. Capaian pembelajaran juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu mengakui dan menghormati keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di nusantara.

Pengelompokkan 9 jenjang kualifikasi KKNI terdiri atas:

- a. Jenjang 1 - 3 yang dikategorisasikan sebagai jabatan operator;
- b. Jenjang 4 - 6 yang dikategorisasikan sebagai jabatan teknisi atau analis;
- c. Jenjang 7 - 9 yang dikategorisasikan sebagai jabatan ahli (Kemendikbud, 2021).

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dengan tingkatan kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

1. lulusan pendidikan dasar (SMP) setara dengan jenjang 1;
2. lulusan pendidikan menengah (SMA) paling rendah setara dengan jenjang 2;
3. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;

4. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
5. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
6. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
7. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
8. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
9. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
10. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI di jalur pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.

Sementara penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja atau pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Tingkatan kualifikasi pada tiap lapangan pekerjaan pada sebuah bidang usaha disusun oleh tim penyusun KKNI yang dibuat oleh Komite Standar Kompetensi pada Kementerian/Lembaga yang menaungi bidang tersebut. Tim penyusun KKNI merupakan representasi dari bidang usaha/industri atau representasi dari kelompok usaha/industri yang serupa. Jenjang kualifikasi dirumuskan dengan berpegang pada kriteria cakupan pelaksanaan pekerjaan, keterampilan dan pengetahuan, kecakapan dalam memproses informasi, tanggung jawab, serta sikap

dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kualifikasi yang termuat pada setiap area pekerjaan pada bidang usaha dirumuskan dengan berdasar pada fungsi bisnis dan/atau jabatan dari sebuah lapangan usaha.

Jika sebuah lapangan pekerjaan pada sebuah bidang usaha tidak memenuhi 9 (sembilan) tingkatan kualifikasi, maka tingkatan kualifikasi pada lapangan pekerjaan tersebut bisa dibuat tidak dalam 9 tingkatan, dan tidak harus diawali dengan tingkat 1 (satu) dan/atau diakhiri dengan tingkat 9 (sembilan). Setiap tingkatan kualifikasi terdiri atas bagian-bagian kompetensi yang sudah diputuskan menjadi SKKNI oleh Menteri Ketenagakerjaan. Penetapan bagian-bagian kompetensi dalam sebuah tingkatan kualifikasi dilaksanakan dengan berdasar pada aturan pengemasan inti dan pilihan.

Tingkatan kualifikasi suatu lapangan pekerjaan pada sebuah bidang usaha yang telah disurun oleh tim penyusun diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan kemudian ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga teknis yang berkaitan. Pemerintah menetapkan implementasi KKNi pada setiap sektor atau bidang pekerjaan melalui kementerian atau lembaga yang menaungi bidang pekerjaan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Ketetapan lebih lanjut mengenai penerapan KKNi di jalur pelatihan kerja atau pengalaman kerja diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan KKNi (Kemendikbud, 2021). Dengan demikian, dalam merumuskan profil lulusan sebuah program studi (prodi) nampaknya tidak terlalu sulit karena bersesuaian dan terkait dengan nama prodi sendiri. Akan tetapi yang sulit adalah mewujudkan lulusan yang kompeten dan

profesional dalam bidangnya masing-masing.

Keberhasilan prodi memerlukan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Fasilitas dan sumber daya manusia itu akan berhasil jika pemimpin mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasinya dengan baik dan benar. Menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Kualitas pemimpin di tingkat prodi, fakultas, dan universitas memengaruhi keberhasilan kinerja prodi.

Desain kurikulum menjadi ranah asosiasi prodi sehingga setiap prodi sebaiknya terlibat aktif dalam asosiasi tersebut. Kondisi saat ini asosiasi prodi-prodi sangat beragam tetapi mulai menunjukkan kekompakan dan kehidupan yang cukup menggembirakan. Secara perlahan mereka mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan atas biaya prodi masing-masing. Dengan dukungan pemerintah dan pimpinan universitas, asosiasi prodi akan semakin hidup dan semarak.

Data di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian mutu lulusan prodi bisa dilakukan dengan alur perumusan profil lulusan yang sesuai zaman, pelaksanaan strategi yang tepat dan fasilitas pendukung yang memadai, evaluasi pembelajaran, dan praktik pengenalan lingkungan sekolah.

Profil lulusan merupakan hal utama yang harus dirumuskan setiap prodi, dan hal ini dapat dirumuskan bersama pada tingkat asosiasi prodi. Setelah menjalani kuliah sesuai jenjang akademiknya, lulusan bisa menjalani profesi tertentu sesuai atau tidak sesuai ijazah. Nama prodi biasanya sudah menunjukkan profesi yang akan dihasilkannya. Secara tekstual misalnya prodi PAI, prodi pendidikan bahasa Arab,

dan prodi pendidikan bahasa Inggris, akan melahirkan pendidik sesuai nama prodinya.

Berbeda dengan kedokteran dan arsitektur misalnya, prodi-prodi S1 yang disebutkan di atas tidak hanya merancang lulusannya menjadi satu profesi tertentu. Lulusan prodi PAI, selain menjadi guru PAI di sekolah dan madrasah juga bisa menjadi penyuluh agama dan penghulu bahkan lebih (Khon, 2019).

Profil lulusan prodi sebaiknya cukup satu saja (tidak ada profil utama dan profil tambahan) karena kurikulum yang didesain memang hanya untuk membekali pengetahuan dan keterampilan serta sikap tertentu yang sesuai dengan satu profesi. Hal ini juga untuk memastikan bahwa kurikulum harus relevan dengan profesi yang dituju, dan menghindari kurikulum yang gemuk. Kurikulum yang tidak fokus ke satu profesi dan gemuk membuat kuliah menjadi lebih lama sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar. Bisa jadi kurikulum yang tidak fokus melahirkan lulusan yang tidak kompeten.

Bukankah standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang tertulis dalam setiap dokumen kurikulum prodi juga hanya untuk satu profesi? Fokus pada satu profesi akan lebih menjamin kualitas lulusan dibanding menginginkan banyak tetapi tidak fokus. Akibatnya terkesan menginginkan banyak hal dalam satu waktu padahal kenyataannya tidak seperti yang tertulis. Artinya, fokus meraih satu tujuan profesi tertentu akan lebih baik dan lebih mudah daripada meraih banyak tujuan profesi yang setengah-tengah (Janah, Nurbayani, & Musfiroh, 2017). Padahal profil lulusan adalah kemampuan yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja (FITK, n.d.). Bahwa fakta lulusan

sebuah prodi banyak bekerja di luar profesi yang sesuai dengan kesarjanaannya biarkan saja (tidak perlu latah menuliskannya dalam dokumen kurikulum). Hal ini tidak akan menjadikan sebuah prodi menjadi rendah dan tidak berkualitas. Bukan malah sebaliknya mengada-adakan istilah profil tambahan atau lainnya.

Sebuah pertanyaan yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut adalah bahwa fakta lapangan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi paling tidak pada empat hal: apakah prodi telah gagal melahirkan lulusan menjadi profesi guru (misalnya) yang kompeten sehingga kalah bersaing? Mengapa lulusan tidak mau menjalani profesi sesuai ijazahnya? Apakah lulusan prodi tertentu sudah sangat berlebih padahal peluang kerja sangat sedikit? Apakah penerimaan mahasiswa prodi sudah mempertimbangkan jumlah kebutuhan kerja pada bidang sejenis?

Tahap selanjutnya yang dilakukan prodi adalah menyiapkan dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan profil lulusan, baik aspek pengetahuan, keterampilan, hingga aspek sikap. Bisa dalam bentuk mata kuliah yang diajarkan di kelas, program di lingkungan dan di luar kampus, hingga masyarakat (Marno, 2019).

Kurikulum memainkan peran penting dalam pencapaian kompetensi lulusan karena ia adalah apa-apa yang diberikan kepada mahasiswa selama di kampus dalam rentang waktu empat tahun. *"The curriculum is like a compass in guiding the ship to sail the world of education. Like a compass, curriculum plays an important role in organizing, directing, and guiding the learning activities"* (Rumahlatu, Huliselan, & Takaria, 2016).

Mata kuliah terdiri dari representasi prodi, fakultas, universitas, bahkan pemerintah. Contoh yang terakhir itu adalah mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan (Shidiq & Syarifah, 2019). Sedangkan contoh mata kuliah universitas adalah bahasa Arab bagi mahasiswa universitas Islam negeri (UIN). Mata kuliah prodi disusun dan ditetapkan oleh asosiasi prodi dalam pertemuan tahunan mereka.

Kecuali itu, prodi merencanakan model pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya kreativitas mahasiswa. Mata kuliah sebagus dan setepat apa pun tidak akan berguna jika model pembelajarannya tidak merangsang inovasi dan daya kritis mahasiswa. Mahasiswa cenderung pasif jika metode dan pendekatan pembelajarannya tidak tepat. Model-model pembelajaran yang disarankan di antaranya *small group discussion*, *problem base learning*, *project best learning*, dan *research base learning* (Janah et al., 2017).

Bahkan dengan perencanaan yang baik, fasilitas yang disediakan kampus seperti asrama dan masjid bisa menjadi pendukung tercapainya kompetensi lulusan. Di UIN Malang misalnya, setiap mahasiswa wajib menempati asrama selama setahun. Di sana mereka dibekali kemampuan bahasa asing, pengetahuan agama, dan membaca Alquran (Marno, 2019). Bahasa Arab diberikan di kelas selama 10 kali pertemuan.

Keterampilan bahasa asing merupakan pintu mahasiswa mempelajari sumber-sumber asing dari asalnya. Bakal calon guru PAI yang menguasai bahasa asing memiliki kesempatan mengajar di sekolah favorit dalam negeri dan sekolah di luar negeri. Guru pendidikan agama Islam

selaiknya menguasai bahasa Arab, lebih bagus lagi menguasai bahasa Inggris karena tuntutan zaman.

Penilaian proses belajar mengajar juga hal penting yang sering diabaikan oleh dosen. Hal itu bukan sekedar Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) serta tugas pembuatan makalah atau resume buku. Penilaian harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Sukiman, 2019). Bahkan, penilaian dilakukan di dalam dan di luar kelas (selama mahasiswa berada di lingkungan dan di luar kampus).

Beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil pembelajaran, yakni teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket (Sukiman, 2019). Sistem penilaian pembelajaran harus valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, serta akuntabel (Marno, 2019).

Penilaian harus meliputi keterampilan tingkat tinggi (*high order thinking skills/ HOTS*) dan harus mampu membiasakan mahasiswa dengan masalah-masalah kontekstual (Suprpto, 2018a). Dengan demikian mereka terlatih memecahkan masalah dan terbiasa berpikir kreatif. Soal-soal uraian, rangkuman buku, dan makalah yang disusun dengan baik akan bisa mendorong mahasiswa untuk menyampaikan ide dan solusi atas persoalan yang ada, baik lokal maupun global (Suprpto, 2018b).

Umpan balik dosen terhadap tugas-tugas mahasiswa penting agar mahasiswa memperbaiki kelemahannya. Bagi dosen, hasil penilaian bisa untuk perbaikan strategi dalam pembelajaran untuk bahan kegiatan mengajar pada kelas yang sama atau kelas yang berbeda. Bagi mahasiswa, hasil

penilaian bisa untuk memperbaiki dan meningkatkan belajar mereka. Hasil evaluasi sangat berguna untuk perbaikan pembelajaran di masa mendatang.

Profesi guru menuntut pemahaman yang luas dan mendalam tentang materi mata pelajaran tertentu, penguasaan strategi menyampaikan pengetahuan yang dimiliki, dan keterampilan dalam penilaian hasil belajar. Keterampilan menyampaikan materi itu merupakan kunci dalam efektivitas pembelajaran.

Oleh karena itu, selain mata kuliah teoritis yang diberikan di kelas selama tujuh atau delapan semester, mahasiswa dibekali dengan mata kuliah praktik seperti pengajaran mikro (*micro teaching*) dan pengenalan lingkungan pendidikan (PLP) (Shidiq dan Syarifah, 2019). Selama masa satu atau dua semester mahasiswa berada di sekolah untuk belajar aspek administrasi dan akademik di bawah bimbingan guru, staf, dan dosen.

Mata kuliah di kelas juga sebaiknya terdiri dari teori dan praktik. Bisa 50 persen teori, 50 persen praktik atau sesuai kebutuhan. Mata kuliah media pembelajaran misalnya, diharapkan bisa menghasilkan karya-karya mahasiswa dalam bidang media pembelajaran dengan bimbingan dosen. Mata kuliah metode pembelajaran menghasilkan metode-metode baru hasil karya mahasiswa.

Setiap mata kuliah terbiasa memberikan tugas membuat makalah dan kajian buku kepada mahasiswa. Hal ini melatih keterampilan menulis dan daya kritis mahasiswa. Melatih keterampilan membaca dan menulis penting bagi guru. Membaca memperkaya pengetahuan guru sedangkan menulis memberikan kesempatan guru menuangkan gagasan solutif terhadap masalah pembelajaran dan

pendidikan.

Pengenalan sekolah/ madrasah bagi mahasiswa sangat penting agar mereka mengenal langsung tata kelola lembaga pendidikan, khususnya terkait proses pembelajaran. Di sini mereka belajar langsung kepada guru senior dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Mereka juga belajar administrasi kepada kepala urusan tata usaha.

Pada praktiknya, mahasiswa tidak hanya mendampingi guru mengajar tetapi langsung diberi kepercayaan mengajar tanpa didampingi oleh guru. Negatifnya, mahasiswa belum tentu siap mental dan mampu mengajar dengan baik karena masih dalam proses belajar. Positifnya, mahasiswa mengalami langsung situasi kelas, dituntut berani dan mampu mengatasi kendala-kendala saat mengajar.

Kualitas sekolah menjadi penting dalam program pengenalan lembaga pendidikan ini. Kualitas dan keikhlasan guru senior dalam mendampingi mahasiswa menjadi kunci efektivitas program ini. Karena itu, kerjasama fakultas keguruan dengan sekolah-sekolah mitra harus menjadi perhatian bersama.

Misal, memerhatikan jumlah honor guru pendamping (selama ini masih dianggap sangat kecil), memberikan piagam penghargaan kepada guru dan kepala sekolah, melibatkan guru sekolah mitra dalam kegiatan kampus, dan melaksanakan pertemuan rutin dengan sekolah-sekolah mitra. Artinya, pertemuan dengan kepala sekolah/madrasah mitra tidak hanya pada saat akan menurunkan mahasiswa ke lembaga pendidikan.

Penempatan mahasiswa di sekolah/ madrasah dengan kualitas biasa atau sedang tidak akan memengaruhi kompetensi

mahasiswa, karena proses belajar berjalan apa adanya. Sedangkan sekolah/ madrasah yang bagus memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa karena banyak hal yang bisa diambil oleh mereka (langsung maupun tidak langsung). Mahasiswa tidak hanya memberi tetapi juga menerima banyak hal dari sekolah dan guru.

Berbeda dengan lulusan pada tahun-tahun sebelumnya, sejak terbit KKNi, selain ijazah, transkrip nilai, lulusan juga memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Surat keterangan ini membuktikan beragam keterampilan yang dimiliki mahasiswa selama menempuh pendidikan. Bukti fisik semacam ini diharapkan berguna untuk para pengguna lulusan terkait keterampilan apa yang dikuasai oleh yang bersangkutan.

Bukti keterampilan berupa SKPI mestinya tidak hanya terbatas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kampus seperti praktek bahasa asing, kuliah kerja nyata (KKN), praktik di sekolah, praktik ibadah, dan lain-lainnya, tetapi kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar kampus lebih diutamakan supaya juga mengetahui kebutuhan pasar. Prodi PAI misalnya, bekerjasama dengan pusat kurikulum dan buku dalam rangka mengenalkan mahasiswa dengan alur penyusunan dan penilaian buku.

KESIMPULAN

Profil lulusan suatu prodi ditentukan oleh asosiasi prodi masing-masing. Alur pencapaiannya dimulai dari penentuan jumlah dan nama mata kuliah yang tepat sesuai kebutuhan profil lulusan, penyiapan fasilitas yang memadai dan dosen serta staf yang kompeten. Kerjasama yang baik dengan lembaga di luar kampus sangat penting untuk pelaksanaan praktik

mengajar dan pemerolehan sertifikat/ surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Sinergi antara dosen dan kepemimpinan yang bagus akan melahirkan lulusan yang kompeten. Mereka akan menjadi guru profesional yang menjadi kebanggaan prodi dan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- FITK UIN Raden Fatah. (n.d.). *Kurikulum Berbasis KKNi, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam*. Palembang: FITK UIN Raden Fatah.
- Hadi, S. (2002). *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Janah, F. J., Nurbayani, E., & Musfiroh, I. (2017). *Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)*. Samarinda. Retrieved from [https://sidia.iain-samarinda.ac.id/file/lihat?file=7c3c56d2aerml3\\$deb4a](https://sidia.iain-samarinda.ac.id/file/lihat?file=7c3c56d2aerml3$deb4a)
- Kemendikbud. (2019). *KKNi*. Retrieved from <http://jdih.kemendikbud.go.id/new/publik/produkhukum/303>
- Kemendikbud. (2021). *KKNi*. Retrieved from <http://jdih.kemendikbud.go.id/new/publik/produkhukum/303>
- Khon, A. M. (2019). *Perbandingan Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan S1 Prodi PAI Berbasis Tracer Studi dan Asosiasi*. Jakarta.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Marno. (2019). *Strategi, Metode, dan Media Pembelajaran PAI Berbasis KKNi di PTKI*. Malang.
- Munadi, M. (2020). *Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 (pertama)*. Jakarta: Kencana.

- Tim Peneliti Balitbang dan Diklat Kemenag RI. (2003). *Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta.
- Rumahlatu, D., Huliselan, E. K., & Takaria, J. (2016). An Analysis of the Readiness and Implementation of 2013 Curriculum in The West Part of Seram District, Maluku Province, Indonesia. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11, 5662–5675.
- Shidiq, S., & Syarifah, H. (2019). *Perbandingan Kurikulum S1 Prodi PAI berbasis KKNi di PTKI*. Jakarta.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Model penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Suprpto. (2018a). Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pascasarjana S2 PAI UIN Mataram. *Al Qolam*, 24(2). Retrieved from <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/538/533>
- Suprpto. (2018b). Kapasitas Alumni Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Gunung Djati Bandung. *Jurnal Dialog*, 41(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v41i2.302>